

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang bersih (Good Government) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, untuk itu diperlukan pertanggung jawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersih dari KKN dan bertanggung jawab dan akuntabel.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diamanahkan. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good government dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara dimata publik. Di sisi lain, terselenggaranya Kegiatan perlu ada sinergi antara semua stake holder dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga Pelaksanaan Program dan Kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai sebuah organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha mengembangkan mekanisme penyusunan Rencana Kerja (RENJA) secara Proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **I.1.1 Pengertian Renja SKPD**

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **I.1.2 Proses Penyusunan Renja SKPD**

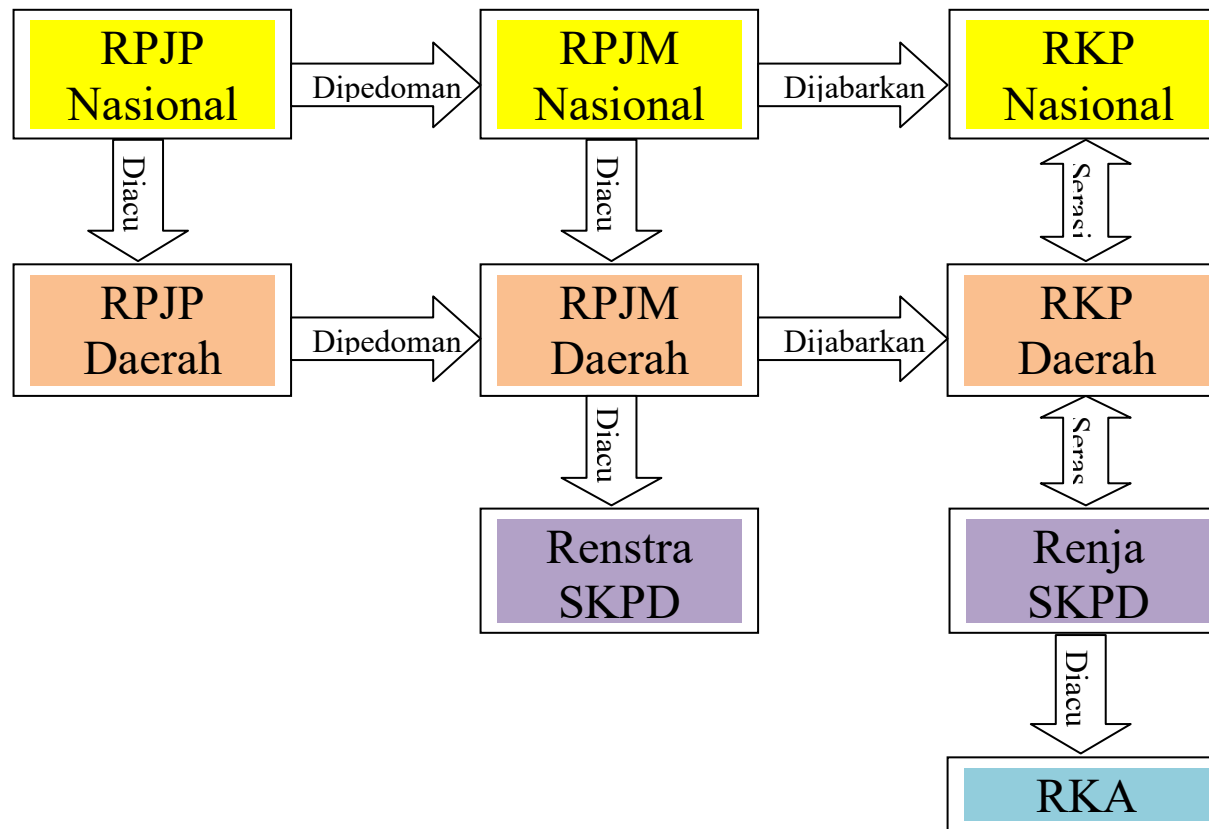
Dalam prosesnya, penyusunan renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra SKPD

Penyusunan renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan renja SKPD ; dan
- b. Tahap penyajian rancangan renja SKPD

### **I.1.3 Keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD**

Keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :





## I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018
17. Peraturan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 Susuna Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Penyusunan Renja ini memiliki dua Tujuan utama yaitu :

1. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan...
2. Rencana Kerja (RENJA) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
3. Rencana Kerja (RENJA) merupakan Pedoman Penyusunan RKA perangkat daerah

Dua Tujuan utama RENJA tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) oleh setiap instansi pemerintah.

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **I 1. Latar belakang**

Mengemukakan pengertina ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **I.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

##### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD



#### I.4 Sistematika

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

### II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

### II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

### II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



## II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dan rancangan awalan RKPD

## **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### III.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

### III.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

### III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Renja Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain daripada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada daerah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan dilakukan.

Secara umum Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap tahun lalu masih melekat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah merupakan instansi yang terbentuk dari pemisahan Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2020.

Adapun program dan kegiatannya yang ada sekarang dan ditahun lalu disesuaikan dengan bidang urusan yang menyangkut urusan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah (bidang pendapatan dan bidang pengawasan)

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra 2018 dapat di lihat pada tabel T.C 29



## T.C 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2020  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 -2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun s/d 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2020) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD 2019 s/d 2023		Capaian
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi SKPD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4	12
4.02	Urusan Penunjang Keuangan										
4.02.02	Badan Pendapatan Daerah										
<b>4.02.02.01</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>									
4.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	2299 Lbr	-	-	-	-	600 Lbr	600 Lbr	23%	
4.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Bln	-	-	-	-	12 Bln	12 Bln	25%	



4.02.02 .01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48 Bln	-	-	-	-	12 Bln	12 Bln	25	
4.02.02 .01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	15 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	80	
4.02.02 .01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya	104 Unit	-	-	-	-	26 Unit	26 Unit	3	
4.02.02 .01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	48 Bln	-	-	-	-	12 Bln	12 Bln	54	
4.02.02 .01.08	Penyediaan jasa kebersihan daerah	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	48 Bln	-	-	-	-	12 Bln	12 Bln	25	
4.02.02 .01.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	48 Item	-	-	-	-	40 Item	40 Item	23	
4.02.02 .01.12	Penyediaan bahan bacaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan	879 Eks.	-	-	-	-	200 Eks.	200 Eks.	23	
4.02.02 .01.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100	



4.02.02 .01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100%	
4.02.02 .01.20	Pelayanan administrasi perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	12 Bln	-	-	-	-	12 Bln	12 Bln	25%	
<b>4.02.02 .02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>									
4.02.02 .02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang diadakan	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	50	
4.02.02 .02.05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	50	
4.02.02 .02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	24 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	13	
4.02.02 .02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	268 Unit	-	-	-	-	129 Unit	129 Unit	48	
4.02.02 .02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara jabatan rutin/berkala	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100	



4.02.02 .02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	104 Unit	-	-	-	-	26 Unit	26 Unit	25	
<b>4.02.02 .06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>									
4.02.02 .06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	24 Lapo ran	-	-	-	-	6 Lapo ran	6 lapo ran	25	
4.02.02 .06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	8 Lapo ran	-	-	-	-	2 Lapo ran	2 lapor an	25	
4.02.02 .06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	4 Lapo ran	-	-	-	-	1 Lapo ran	1 lapor an	25	
4.02.02 .06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 Lapo ran	-	-	-	-	1 Lapo ran	1 lapor an	25	
<b>4.02.02 .19</b>	<b>Program perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pendapatan daerah</b>	<b>Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>									
4.02.02 .19.01	Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase terselenggaranya sistem informasi pajak dan retribusi daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100	



4.02.02 .19.02	Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100	
4.02.02 .19.03	Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & retribusi daerah	Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100	
4.02.02 .19.04	Pemeriksaan pajak daerah	Persentase meningkatnya Penerimaan PAD	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100	
4.02.02 .19.05	Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase meningkatnya pengawasan PAD	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100	



## **II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN**

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing Bidang. Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel T.C 30



TC.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase tercapainya penerimaan pajak & retribusi daerah				-	85%	90%	90%	-	-	90%	90%	



## **II. 3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan pendapatan Daerah kabapten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah berbagai permasalahan dihadapi berikut daftar permasalahan yang dihadapi di seluruh bidang SKPD Bapenda:

1. Kurang optimal pelayanan kepada wajib pajak
2. Sistem aplikasi yang belum terintegrasi dan online
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi
4. Belum optimalnya sinergitas antara instansi pengelolaan petugas pemungut pajak daerah & retribusi daerah.
5. Kurang Sumber Daya Manusia

Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi tantangan dan peluang diantaranya :



1. Tantangan
  1. Mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak
  2. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Peluang
  - a. Adanya Sistem Pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah berbasis IT
  - b. Tingkat pendidikan aparatur pengelola yang tinggi
  - c. Kuantitas aparatur pengelola pendapatan daerah

#### **II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program /kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T.C31



## TC.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2021  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indukatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program pelayanan administrasi perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran		1.976.164.810	Program pelayanan administrasi perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran		2.451.540.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Pangkajene Sidrap	Jumlah dokumen yang bermaterai	Lbr 562	3.165.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Pangkajene Sidrap	Jumlah dokumen yang bermaterai	Lbr 600	4.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln 12	284.217.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln 12	395.400.000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bln 12	26.301.150	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bln 12	61.010.000	



	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Unit 4	20.572.500	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Unit 3	20.573.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pangkajene Sidrap	Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya	Unit 26	15.508.500	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pangkajene Sidrap	Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya	Unit 26	15.509.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan administrasi keuangan	Bulan 12	174.799.785	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan administrasi keuangan	Bulan 12	235.800.000	
	Penyediaan jasa kebersihan daerah	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bln 12	21.031.425	Penyediaan jasa kebersihan daerah	Pangkajene Sidrap	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan 12	49.048.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Item 42	9.155.290	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Item 40	30.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan	Pangkajene Sidrap	Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan	Eks. 211	4.220.000	Penyediaan bahan bacaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan	Pangkajene Sidrap	Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan	Eks. 200	20.000.000	



	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam Kab. Sidrap	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah	Kali 50	31.650.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam Kab. Sidrap	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah	kali 50	150.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah	kali 50	369.250.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah	kali 50	350.000.000
	Pelayanan administrasi perkantoran	Pangkajene Sidrap	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	Bln 12	1.016.294.160	Pelayanan administrasi perkantoran	Pangkajene Sidrap	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	Bulan 12	1.120.200.000
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>882.039.080</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>1.761.716.000</b>
	Pembangunan gedung kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah bangunan kantor yang diadakan	unit 1	209.890.000	Pembangunan gedung kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah bangunan kantor yang diadakan	Unit 1	198.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pangkajene Sidrap	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	unit 1	238.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pangkajene Sidrap	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Unit 2	550.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit 3	60.292.195	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit 3	104.000.000



	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit 107	311.108.950	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit 107	396.000.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit 1	168.800.000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pangkajene Sidrap	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit 1	232.069.000	
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pangkajene Sidrap	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit 26	341.837.935	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pangkajene Sidrap	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit 26	281.647.000	
3	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>27.402.570</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>95.099.000</b>	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pangkajene Sidrap	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan 6	17.305.165	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pangkajene Sidrap	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	laporan 6	85.000.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Pangkajene Sidrap	Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan 2	3.372.835	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Pangkajene Sidrap	Jumlah laporan keuangan semesteran	laporan 2	3.373.000	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Pangkajene Sidrap	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Laporan 1	3.787.450	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Pangkajene Sidrap	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	laporan 1	3.788.000	



	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pangkajene Sidrap	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan 1	2.937.120	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pangkajene Sidrap	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	laporan 1	2.938.000	
4	<b>Program perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pendapatan daerah</b>		<b>Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>		<b>5.580.247.890</b>	<b>Program perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pendapatan daerah</b>		<b>Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>		<b>9.118.476.000</b>	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene Sidrap	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kegiatan 1	250.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene Sidrap	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	kegiatan 1	250.000.000	
	Penyusunan Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	Pangkajene Sidrap	Jumlah Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	dokumen 1	212.000.000	Penyusunan Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	Pangkajene Sidrap	Jumlah Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	dokumen 1	212.000.000	
	Penyusunan Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah	Pangkajene Sidrap	Jumlah Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah	PerdaPerbub 5	200.000.000	Penyusunan Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah	Pangkajene Sidrap	Jumlah Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah	PerdaPerbub 5	200.000.000	
	Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	Kab. Sidrap	Persentase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah	dok 24	88.500.000	Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	Kab. Sidrap	Persentase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah	dok 24	88.500.000	



	Konsultasi & Pendampingan Wajib Pajak & Retribusi		Jumlah Kegiatan Pendampingan	Kegiatan 2	174.000.000	Konsultasi & Pendampingan Wajib Pajak & Retribusi		Jumlah Kegiatan Pendampingan	Kegiatan 2	174.000.000	
	Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah	Kab. Sidrap	Jumlah aplikasi	aplikasi 2	98.342.880	Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah	Kab. Sidrap	Jumlah aplikasi	aplikasi 2	748.200.000	
	Pemeliharaan & pemutakhiran basis data pajak daerah & retribusi daerah	Kab. Sidrap	Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah	bulan 12	4.349.992.880	Pemeliharaan & pemutakhiran basis data pajak daerah & retribusi daerah	Kab. Sidrap	Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah	bulan 12	5.910.972.000	
	Pemeriksaan pajak daerah	Kab. Sidrap	Persentase meningkatnya Penerimaan PAD	% 100	209.875.370	Pemeriksaan pajak daerah	Kab. Sidrap	Persentase meningkatnya Penerimaan PAD	% 100	199.000.000	
	Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Kab. Sidrap	Persentase meningkatnya pengawasan PAD	bulan 12	247.536.760	Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Kab. Sidrap	Persentase meningkatnya pengawasan PAD	bulan 12	1.335.804.000	
	<b>Jumlah</b>				<b>8.715.854.350</b>	<b>Jumlah</b>				<b>13.426.831.000</b>	



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya asing.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka visi presiden tahun 2020-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”**

Berdasarkan lampiran 1 perpres Nomor 18 tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Secara rinci sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan ditribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-

- undang. Pertama, UU cipta lapangan kerja. Kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
  5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### III. 2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPENDA

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, Aman, Adil dan sejahtera”**. Melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2018-2023 adalah meningkatkan penerimaan keuangan daerah.

Sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap :

1. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah
2. Meningkatnya pencapaian kinerja pemerintah daerah

### **III. 4 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerja sama dengan masyarakat.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Renja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik.
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.
  - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - l. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - a. Pembangunan Gedung Kantor
    - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
    - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
    - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
    - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
    - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  3. Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
    - c. Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran
    - d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  4. Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendapatan
    - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
    - b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan & pengembangan pendapatan
    - c. Penyusunan kebijakan tentang intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah
    - d. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah
    - e. Konsultasi dan pendampingan wajib pajak & retribusi
    - f. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah



- g. Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & retribusi daerah
- h. Pemeriksaan pajak daerah
- i. Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan dapat dilihat pada tabel T.C 33.



## TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

Kode	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CAT ATA N PEN TIN G	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDUKATIF	SUMB ER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDUKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.0 1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			2.451.540.000				2.574.117.000
4.02.02.0 1.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Pangkajene Sidrap	Lbr 600	4.000.000	APBD		Lbr 700	4.200.000
4.02.02.0 1.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkajene Sidrap	Bln 12	395.400.000	APBD		Bln 12	415.170.000
4.02.02.0 1.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkajene Sidrap	Bln 12	61.010.000	APBD		Bln 12	64.060.000
4.02.02.0 1.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan barang daerah	Pangkajene Sidrap	Unit 4	20.573.000	APBD		Unit 4	21.602.000



4.02.02.0 1.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disyahkan STNKnya	Pangkajene Sidrap	Unit 26	15.509.000	APBD		Unit 26	16.285.000
4.02.02.0 1.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	Pangkajene Sidrap	Bulan 12	235.800.000	APBD		Bulan 12	247.510.000
4.02.02.0 1.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkajene Sidrap	Bulan 12	49.048.000	APBD		Bulan 12	51.500.000
4.02.02.0 1.11	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Pangkajene Sidrap	Item 42	30.000.000	APBD		Item 42	31.500.000
4.02.02.0 1.12	Penyediaan bahan bacaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku bacaan & peraturan perundang-undangan	Pangkajene Sidrap	Eks. 211	20.000.000	APBD		Eks. 211	21.000.000
4.02.02.0 1.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke dalam daerah	Dalam Kab. Sidrap	Kalo 50	150.000.000	APBD		kalo 50	157.500.000
4.02.02.0 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Kali 50	350.000.000	APBD		kali 50	367.500.000
4.02.02.0 1.20	Pelayanan administrasi perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	Pangkajene Sidrap	Bln 12	1.120.200.000	APBD		Bln 12	1.176.210.000
<b>4.02.02.0 2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>1.761.716.000</b>				<b>1.064.402.000</b>



4.02.02.0 2.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan kantor yang diadakan	Pangkajene Sidrap	Unit 1	198.000.000	APBD			-
4.02.02.0 2.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	Pangkajene Sidrap	Unit 2	550.000.000	APBD			-
4.02.02.0 2.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Pangkajene Sidrap	Unit 3	104.000.000	APBD		Unit 3	109.200.000
4.02.02.0 2.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Pangkajene Sidrap	Unit 107	396.000.000	APBD		Unit 51	415.800.000
4.02.02.0 2.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara jabatan rutin/berkala	Pangkajene Sidrap	Unit 1	232.069.000	APBD		Unit 1	243.673.000
4.02.02.0 2.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Pangkajene Sidrap	Unit 26	281.647.000	APBD		Unit 26	295.729.000
<b>4.02.02.0 6</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>95.099.000</b>				<b>99.855.000</b>
4.02.02.0 6.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Pangkajene Sidrap	Laporan 6	85.000.000	APBD		laporan 6	89.250.000
4.02.02.0 6.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Pangkajene Sidrap	Laporan 2	3.373.000	APBD		laporan 2	3.542.000
4.02.02.0 6.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Pangkajene Sidrap	Laporan 1	3.788.000	APBD		laporan 1	3.977.000



4.02.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Pangkajene Sidrap	Laporan 1	2.938.000	APBD		laporan 1	3.085.000
<b>4.02.02.04</b>	<b>Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>	<b>Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>			<b>9.118.476.000</b>				<b>9.255.000</b>
4.02.02.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene Sidrap	Kegiatan 1	250.000.000	APBD		kegiatan 1	250.125.000
4.02.02.202.01	Penyusunan Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	Jumlah Kebijakan Tehnis Perencanaan & Pengembangan Pendapatan	Pangkajene Sidrap	Dokumen 1	212.000.000	APBD		dokumen 1	212.106.000
4.02.02.202.02	Penyusunan Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan tentang Intensifikasi Pajak & Retribusi Daerah	Pangkajene Sidrap	Perda Perbub 5	200.000.000	APBD		Perda Perbub 5	200.100.000
4.02.02.19.03	Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase penyusunan SOP Pajak & Retribusi Daerah	Pangkajene Sidrap	SOP 10	88.500.000	APBD		SOP 10	93.000.000
4.02.02.202.07	Konsultasi & Pendampingan Wajib Pajak & Retribusi	Jumlah Kegiatan Pendampingan	Pangkajene Sidrap	Kegiatan 2	174.000.000	APBD		Kegiatan 2	174.870.000
4.02.02.202.08	Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi pajak & retribusi daerah	Pangkajene Sidrap	Aplikasi 2	748.200.000	APBD		aplikasi 2	800.000.000



4.02.02.1 9.03	Pemeliharaan & pemutahiran basis data pajak daerah & retribusi daerah	Persentase terpeliharanya dan pemutakhiran basis data pajak dan retribusi daerah	Pangkajene Sidrap	bulan 12	5.910.972.000	APBD		bulan 12	5.913.927.000
4.02.02.1 9.04	Pemeriksaan pajak daerah	Persentase meningkatnya Penerimaan PAD	Pangkajene Sidrap	% 100	199.000.000	APBD		% 100	208.950.000
4.02.02.1 9.05	Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase meningkatnya pengawasan PAD	Kab. Sidrap	bulan 12	1.335.804.000	APBD		bulan 12	1.402.594.000
<b>Jumlah</b>					<b>13.426.831.000</b>				<b>12.994.046.000</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 terdapat 4 (empat) program dan 27 (dua tujuh) kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat menuju Sidenreng Rappang dan Terdepat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Rahmat Kartolo Tahir S.S0s, M.Si  
Pangkat : Pembina IV/a  
Nip :19680911 199803 1 010

